Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Petani Tambak oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo Kabupaten Sidoarjo

Naprillia Khusherawati[1], Melda Fadiyah Hidayat[2], Harmanto[3], Eva Hany Fanida[4]
[1,2,3,4]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
E-mail: naprilliakhusherawati.21072@mhs.unesa.ac.id

Article History:
Received: 03 Februari 2025
Revised: 15 Maret 2025
Accepted: 21 Maret 2025

Kata Kunci: *pemberdayaan masyarakat, kelompok petani tambak, pemerintah desa.*

Abstrak: *Daerah di provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak potensi tambak adalah Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Wilayah desa yang 70% berupa tambak menjadikan mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani tambak. Pengelolaan tambak dilakukan oleh petani tambak dengan metode tradisional atau ilmu turun temurun yang dipelajari secara otodidak. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya keterbatasan kemampuan budidaya yang dimiliki. Oleh karenanya, diperlukan adanya peran pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan terhadap kelompok petani tambak untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yakni budidaya perikanan tambak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap kelompok petani tambak di Desa Tambak Kalisogo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori pemberdayaan masyarakat menurut Scheyvens yang terdiri atas pemberdayaan ekonomi, psikologis, sosial, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa masih memerlukan peningkatan signifikan, khususnya pada aspek pemberdayaan psikologis dan sosial. Minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam aktivitas kelompok petani tambak menjadi kendala dalam tercapainya pemberdayaan yang maksimal. Maka dari itu, penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam pola interaksi antara pemerintah desa dan kelompok petani tambak, serta penguatan kapasitas kelompok melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai pemberdayaan yang optimal.*

PENDAHULUAN

Letak Indonesia secara geografis berada di 6º LU - 11º LS dan 95º BT - 141º BT. Indonesia terdiri dari pulau besar dan kecil sejumlah kurang lebih 17.504 pulau. Sebagian besar dari wilayah Indonesia adalah laut dengan panjang garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada yakni 95.161 km (Arianto, M.F. 2020). Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim karena besarnya wilayah perairan yang dimiliki. Negara maritim merupakan negara yang memiliki keunggulan dalam sektor kelautan sebagai salah satu pondasi utama dalam pembentukan identitas nasional, ekonomi, dan juga geopolitik (Irianto, 2021). Berdasarkan hasil Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 10 Desember 1982, luas wilayah lautan Indonesia yakni sebesar 3.257.357 km² (Portal Informasi Indonesia, 2023). Oleh karenanya, Indonesia saat ini memiliki potensi akan sumber daya laut yang besar. Pemanfaatan potensi kelautan Indonesia seperti perikanan secara baik dan maksimal dapat menjadi salah satu peluang besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta memberikan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat dan perekonomian negara.

Potensi perikanan di Indonesia tidak hanya berasal dari laut saja, akan tetapi juga dapat berasal dari daratan atau biasa disebut dengan perikanan air tawar (Hakim dan Eriyanti, 2019). Hasil perikanan air tawar ini beraneka ragam seperti ikan hias, ikan untuk konsumsi, bahkan juga termasuk udang. Tidak hanya itu, pada beberapa daerah di Indonesia sendiri terdapat aktivitas budidaya perikanan. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menjelaskan bahwa pembudidayaan ikan adalah suatu aktivitas memelihara, membesarkan, dan/atau mengembangbiakkan ikan serta mengambil hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang memanfaatkan kapal untuk membawa, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Aktivitas budidaya ikan ini dilakukan oleh para petani ikan yang kemudian menghasilkan produksi perikanan budidaya dengan data sebagai berikut:

Tabel 1. Total Produksi Perikanan Budidaya di Indonesia

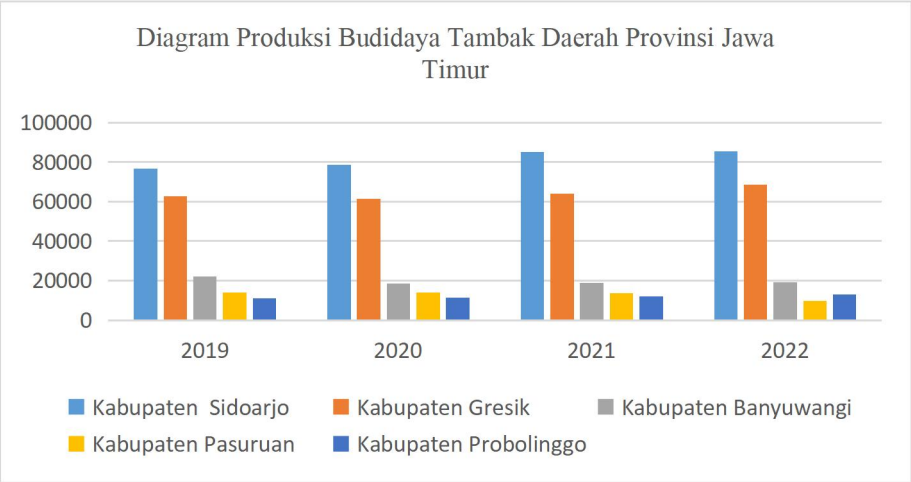
No.	Tahun	Total Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
1.	2019	15.425.624,63
2.	2020	14.845.014,91
3.	2021	14.648.309,71
4.	2022	14.776.056,93

Sumber: Data Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dalam rentang waktu 2019 – 2022 jumlah produksi perikanan budidaya di Indonesia mencapai 61.695.006,18 ton. Salah satu provinsi di Indonesia dengan garis pantai dan luas perairan yang besar ialah Jawa Timur. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah daratan di Jawa Timur sebesar 42.541 km², total panjang garis pantai 3.543,54 km², luas wilayah laut 5.202 km², dan total luas perairan ialah 5.240.812,36 Ha. Melihat jumlah total luas wilayah perairan dan garis pantai tersebut, menjadikan Jawa Timur mempunyai potensi yang cukup besar dalam mengoptimalkan hasil perikanan baik melalui perikanan tangkap ataupun budidaya ikan air laut (Soecahyo, D. et al.

2023).

Provinsi Jawa Timur menduduki urutan ketiga dengan potensi produksi perikanan budidaya tertinggi di Indonesia berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur (BPS, 2024). Perikanan budidaya terdiri dari berbagai jenis, salah satunya yakni budidaya perikanan tambak. Budidaya tambak merupakan suatu kegiatan budidaya perikanan dengan kolam buatan yang biasanya aktivitas ini dilakukan pada daerah pesisir laut. Budidaya perikanan tambak terdapat 3 jenis yaitu tambak insentif, tambak semi insentif, dan tambak tradisional. Jumlah produksi budidaya perikanan jenis tambak di Jawa Timur dalam 4 tahun terakhir mulai dari 2019 hingga 2022 mencapai 1.015.940 ton (BPS Jawa Timur, 2024).



Gambar 1. Diagram Jumlah Produksi Budidaya Tambak Menurut Daerah di Jawa Timur
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Mengamati data jumlah produksi budidaya tambak per-daerah di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidooarjo menduduki posisi tertinggi dalam kepemilikan sumber daya perikanan terutama dengan jenis budidaya tambak. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 – 2044 menunjukkan bahwa kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Sidoarjo sebesar kurang lebih 14.597 Ha dan tersebar di berbagai Kecamatan. Wilayah dengan potensi perikanan yang tinggi di Kabupaten Sidoarjo salah satunya adalah Kecamatan Jabon (Septyanni et al., 2021). Kawasan Kecamatan Jabon berbatasan dengan laut sebelah timur dan memiliki tekstur tanah berupa lumpur yang mengakibatkan wilayah ini sangat berpotensi dalam budidaya perikanan khususnya tambak. Potensi wilayah tambak terluas di Kecamatan Jabon dimiliki oleh Desa Tambak Kalisogo. Desa Tambak Kalisogo disebut dengan daerah pertambakan dikarenakan kondisi wilayahnya yang sebesar 70% berupa tambak (Septyanni et al., 2021). Jumlah luas area tambak di Desa Tambak Kalisogo hingga tahun 2023 tercatat sebesar 703 Ha (Satu Data Sidoarjo, 2023).

Besarnya potensi tambak yang dimiliki Desa Tambak Kalisogo menjadikan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tambak sekaligus memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya perikanan. Mayoritas tambak di Desa Tambak Kalisogo adalah jenis tambak sederhana atau tradisional dengan komoditas utama udang vaname dan mujair nila. Pengelolaan tambak dilakukan oleh petani tambak dengan metode tradisional atau ilmu turun temurun yang dipelajari secara otodidak. Kondisi tersebut menjadikan seringkali terdapat beberapa permasalahan yang sulit diatasi secara mandiri dan dapat

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat akibat keterbatasan kompetensi para petani tambak. Oleh karenanya, guna mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan adanya dukungan peran pemerintah melalui dilakukannya pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera melalui pemanfaatan potensi utama desa dengan lebih maksimal.

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dimulai dari sektor pemerintahan terkecil yakni pemerintah desa dengan kewenangannya untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk dalam memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan desa (Sari et al., 2023). Pelayanan pemberdayaan masyarakat desa merancang program pembangunan mandiri untuk mewujudkan rencana strategis pedesaan (Nurhasanah Purba dan Ivanna, 2024) . Pemerintah Desa Tambak Kalisogo harus dapat melakukan pemberdayaan terhadap kelompok petani tambak sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang menjadi potensi lokal utama di desa. Potensi lokal tersebut menjadi komoditas yang dapat memenuhi kesejahteraan dan pendapatan masyarakat (Wibisono et al., 2023) . Oleh karenanya, pemberdayaan kelompok petani tambak menjadi hal penting guna meningkatkan kesejahteraan warga melalui dukungan terhadap keberhasilan potensi budidaya tambak.

Berbagai sumber bacaan telah menganalisis terkait pemberdayaan masyarakat dengan objek dan teori yang berbeda – beda. Penelitian pertama membahas terkait "Pemberdayaan Petani Tambak Udang oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan Provinsi Kalimanan Utara" dilakukan menggunakan teori dari Totok Mardikanto dan Poerwoko yang menghasilkan temuan meliputi Bina Manusia, dilakukan dengan memberikan berbagai program pelatihan terhadap kelompok petani tambak; Bina Usaha, dilakukan dengan diberikan sarana dan prasarana untuk budidaya; Bina Lingkungan, diberikan kegiatan sosialisasi terkait penggunaan racun yang aman dan tidak mencemari lingkungan; serta Bina Kelembagaan yang dilakukan dengan pemberian kebijakan terhadap petani tambak. Namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan terhadap berbagai hambatan agar pelaksanaan pemberdayaan dapat lebih optimal (Merinda, 2022).

Penelitian kedua dilakukan dengan membahas terkait "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Perikanan Budidaya di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo" menggunakan teori pemberdayaan Edi Suharto dimana memberikan hasil temuan yang pertama yakni Pendekatan Pemungkinan, dimana tahap ini telah terlaksana dengan baik menyesuaikan karakteristik masyarakat dan kondisi wilayah; Pendekatan Penguatan, dilakukan dengan pemberian penyuluh perikanan untuk memberikan pengarahan budidaya; Pendekatan Perlindungan, diselenggarakan dengan pembentukan Koperasi yang beranggotakan kelompok perikanan; Pendekatan Penyokongan, diwujudkan dengan terbentuknya Program Kampung Perikanan Budidaya dan bantuan sarana prasarana; serta Pendekatan Pemeliharaan, dilakukan dengan pemberian pengarahan terhadap keberlanjutan usaha dan peningkatan produktivitas. Meski seluruh komponen telah terlaksana dengan baik namun tetap memerlukan optimalisasi lebih lanjut (Putra dan Rahaju, 2023).

Berdasarkan uraian kajian empiris dan gap penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Petani Tambak oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo Kabupaten Sidoarjo". Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo terhadap kelompok petani tambak dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan warganya melalui potensi utamanya yakni sektor budidaya perikanan tambak. Aspek teori untuk acuan dalam meneliti ialah menggunakan kerangka kerja

pemberdayaan oleh Scheyvens (1999) yang terdiri atas pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan psikologis, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan politik. Pengambilan keputusan atas digunakannya kerangka pemberdayaan tersebut dikarenakan belum dijumpai penelitian terkait pemberdayaan petani tambak dengan teori serupa. Tidak hanya itu, kerangka pemberdayaan ini menunjukkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya melalui pemanfaatan potensi sumber daya di desanya. Oleh karenanya, penggunaan kerangka pemberdayaan yang dikemukakan Scheyvens (1999) dapat menjadikan penelitian ini berbeda dengan yang lainnya dan menimbulkan kebaharuan ilmiah serta menjawab persoalan penelitian.

LANDASAN TEORI

1. Pemberdayaan Masyarakat

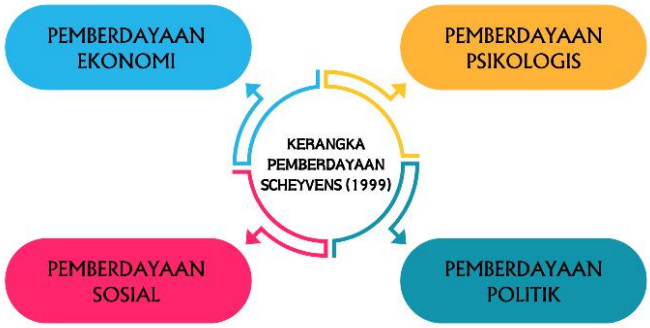
Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu konsep yang tercipta seiring dengan evolusi pemikiran dan dinamika kebudayaan dalam masyarakat (Mustanir, et al., 2023) . Pendekatan pemberdayaan masyarakat dipilih karena adanya akar dari suatu permasalahan seperti kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan, dan ketidakadilan yang bersumber dari ketidakberdayaan masyarakat. Sedangkan dari perspektif manajemen yang bersifat filosofis, pendekatan pemberdayaan lebih menekankan konsep pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Dalam implementasinya, pemberdayaan masyarakat mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang dimulai dari tingkat komunitas paling dasar. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan dan kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola proses pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan hingga pelaksanaannya (Mustanir, et al., 2023)

Pemberdayaan tidak memiliki definisi yang bersifat universal. Pemaknaan pemberdayaan sangat beragam sesuai sudut pandang setiap individu serta konteks kelembagaan, politik, dan sosial-budaya yang melingkupinya. Mardikanto dan Poerwoko dalam bukunya (2019:100), mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembelajaran bersama yang partisipatif. Tujuan akhirnya adalah terciptanya kehidupan yang lebih mandiri, berdaya, dan partisipatif, serta mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah rancangan yang bersifat sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan (Harini et al., 2023) . Melalui pemberdayaan masyarakat, diharapkan setiap individu dan komunitas dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi berbagai tantangan secara mandiri serta diberikan dorongan untuk dapat melakukan pengembangan kreativitas dalam rangka mengoptimalkan potensi dan peluang yang tersedia, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup serta mendukung pembangunan diri dan lingkungan secara berkelanjutan (Pathony, 2019).

Menurut Suharto (dalam Ibrahim, 2020) , pemberdayaan dapat dipahami sebagai sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan melibatkan serangkaian upaya untuk memperkuat posisi, kapasitas, atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada kondisi ideal yang dihasilkan dari perubahan sosial di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka baik dalam aspek fisik, ekonomi, maupun sosial. Hal ini mencakup peningkatan kepercayaan diri, kemampuan menyampaikan aspirasi, akses terhadap pekerjaan, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta kemandirian dalam menjalani kehidupan dan menyelesaikan tugas sehari-hari.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses individu, kelompok, dan komunitas lokal secara aktif mengenali kebutuhan, mengembangkan kapasitas, serta membangun kendali atas kehidupan dan jenis masyarakat yang ingin mereka wujudkan (Coy, D., et al., 2021). Pendekatan pemberdayaan dalam pembangunan menitikberatkan pada penerapan demokrasi langsung, penguatan kemandirian lokal, pembelajaran sosial berbasis pengalaman, serta pengambilan keputusan secara mandiri oleh komunitas yang terorganisasi secara teritorial. Pendekatan ini bertujuan untuk memobilisasi berbagai aktor, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan sektor publik, guna mentransformasikan kekuatan sosial menjadi kekuatan politik. Pendekatan pemberdayaan, sebagai elemen utama dalam pembangunan alternatif, memberikan penekanan lebih pada otonomi dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat yang terorganisasi secara teritorial, kemandirian lokal tanpa mengarah pada autarki, penerapan demokrasi langsung yang bersifat partisipatif, serta pembelajaran sosial berdasarkan pengalaman langsung. Scheyvens (1999) mengemukakan bahwa dalam kerangka kerja ini, pemberdayaan dikelompokkan dalam empat tingkatan utama, yaitu pemberdayaan psikologis, sosial, politik, dan ekonomi.

Kerangka kerja pemberdayaan masyarakat yang diusung oleh Scheyvens merupakan hasil pengembangan atas kerangka pemberdayaan oleh Friedmann dalam bukunya dengan judul "Empowerment: The Politics of Alternative Development" dimana terdiri hanya atas 3 indikator yaitu pemberdayaan psikologis, sosial, dan politik (Scheyvens dan van der Watt, 2021). Pengembangan kerangka pemberdayaan dilakukan oleh Scheyvens dengan menambahkan indikator pemberdayaan ekonomi. Tujuannya adalah guna mengetahui dukungan pemberdayaan terhadap perekonomian kelompok masyarakat dari pemanfaatan potensi lokal utama yang ada di lingkungan (Scheyvens, 1999).



Gambar 2. Kerangka Pemberdayaan Scheyvens (1999)
Sumber: Olahan Peneliti dari Scheyvens (1999)

2. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa didefinisikan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan serta pengelolaan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa diberi wewenang luas untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri, termasuk melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa (Saufiyah, et al., 2024). Setiap desa memiliki tujuan untuk mendorong kemajuan pembangunan tingkat lokal sekaligus berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menjalankan pemerintahan di tingkat

lokal, terutama di konteks pembangunan desa yang berkelanjutan. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa pembangunan desa memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta mencegah adanya kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Bersumber pada Undang – Undang tersebut dapat diketahui bahwasanya pembangunan desa harus dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan hal tersebut menyangkut kesejahteraan serta kualitas hidup bersama masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat desa melalui upaya pemberdayaan komunitas setempat (Syaifudin dan Muhammad, 2022).

Tujuan dari pembangunan desa juga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo. Kepengurusan Pemerintahan Desa Tambak Kalisogo dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa Tambak Kalisogo memiliki potensi lingkungan berupa tambak yang sekaligus menjadi sumber matapencaharian utama bagi warganya. Guna mewujudkan pembangunan desa yang dapat meningkatkan taraf kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Desa Tambak Kalisogo harus dapat menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensinya yakni budidaya perikanan tambak. Penelitian ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo terhadap masyarakatnya terutama kelompok petani tambak. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kerangka pemberdayaan oleh Scheyvens (1999).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (dalam Humaira, 2022) penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian berdasarkan pada paradigma filsafat postpositivisme yang diterapkan untuk mengkaji fenomena kondisi objek secara alami dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Penekanan utama dari hasil penelitian kualitatif terletak pada pemahaman makna dibandingkan penyamarataan temuan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami subjek penelitian, baik pada tingkat individu maupun kelompok secara lebih mendalam dan komprehensif. Menurut Lexy J. Moleong, data yang dihimpun dalam penelitian kualitatif terdiri atas kata-kata, gambar, dan bukan angka (Fatonah et al., 2024) . Pendekatan studi kasus merupakan metodologi penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap suatu kasus yang terjadi dalam kehidupan nyata atau dalam konteks kontemporer (Sarosa, 2021). Dalam konteks ini, tujuan dilakukannya penelitian ialah untuk menganalisis sebuah peristiwa spesifik yaitu upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap kelompok petani tambak.

Lokasi penelitian berada di Desa Tambak Kalisogo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, observasi, dan analisis dokumen. Sumber data pada penelitian yakni bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi, observasi, laporan, dan juga arsip tertulis yang berkredibilitas. Teknik pengambilan sampel dalam menentukan informan penelitian dilakukan dengan *purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode pengambilan sampel non-random dimana peneliti secara sengaja memilih individu atau kelompok dengan karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian

untuk memastikan bahwa sampel terpilih dapat memberikan informasi yang sesuai dan menjawab pertanyaan penelitian secara optima (Lenaini, 2021). Informan utama pada penelitian ini adalah pemerintah desa dan kelompok petani tambak di Desa Tambak Kalisogo. Pihak pemerintah desa diwakili oleh Sekretaris Desa Bapak Muchamad Rofi'i, sedangkan pihak kelompok petani tambak diwakili oleh Ketua Kelompok Bapak Syaifuddin.

Sumber data utama diperoleh dari hasil wawancara semi terstruktur dimana proses pemberian pertanyaan dilaksanakan berdasarkan teori kerangka pemberdayaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, peneliti juga tidak membatasi atas jawaban yang diberikan oleh informan sehingga dapat menggali informasi terkait penelitian secara lebih jauh (Sarosa, 2021). Data yang telah diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian baik primer maupun sekunder adalah bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif dilangsungkan secara interaktif dan diproses berkleanjutan hingga tuntas, sehingga data diperoleh dengan maksimal (Miles dan Huberman, dalam Sugiyono 2021:246). Proses analisis data berlangsung dalam 3 tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau pengambilan kesimpulan. Reduksi data merupakan suatu proses merangkum hasil penelitian untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian atau narasi deskriptif. Tahap yang terakhir ialah penarikan kesimpulan yang menunjukkan temuan baru dari hasil penelitian sekaligus menjawab persoalan penelitian.



Gambar 3. Proses Wawancara dengan Pemerintah Desa Tambak Kalisogo
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tambak Kalisogo dikenal akan potensi utama nya yakni budidaya perikanan tambak. Hal tersebut dikarenakan banyaknya jumlah tambak yang ada di Desa Tambak Kalisogo. Oleh karenanya, kondisi tersebut menjadikan warga Desa Tambak Kalisogo mayoritas bermatapencaharian sebagai petani tambak. Gambaran terkait kondisi wilayah Desa Tambak Kalisogo disajikan dalam gambar berikut;



Gambar 4. Potret Desa Tambak Kalisogo
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Aktivitas budidaya perikanan dilakukan oleh petani tambak menggunakan metode tradisional dengan kemampuan terbatas. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa budidaya tambak di Desa Tambak Kalisogo dilakukan dengan keterbatasan kompetensi yang dimiliki para petani tambak, sehingga sangat penting untuk dilakukan pemberdayaan oleh pemerintah setempat. Tujuan dari pemberdayaan tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan serta keberhasilan dimana nantinya juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta pembangunan ekonomi desa. Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara, selanjutnya hasil dari penelitian akan dikaji berdasarkan perspektif teoritis sesuai kondisi nyata di lapangan. Teori yang digunakan adalah kerangka pemberdayaan masyarakat yang dicetuskan oleh Scheyvens (1999) yaitu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan psikologis, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan politik. Sesuai dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan kajian empiris dari masing – masing indikator pemberdayaan.

A. Pemberdayaan Ekonomi

Komunitas dengan kemandirian ekonomi memiliki kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya produktif (Gohori dan van der Merwe, 2022) . Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan berbagai indikator yang mencerminkan dampak positif secara multidimensional, di antaranya adalah terciptanya peluang kerja dan usaha, keuntungan ekonomi berkelanjutan, distribusi manfaat yang lebih merata di berbagai lapisan masyarakat, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan pembangunan fisik (Scheyvens dan van der Watt, 2021). Keuntungan ekonomi yang berkelanjutan menunjukkan bahwa dampak positif dari pemberdayaan tidak bersifat sementara, melainkan didukung oleh sistem yang stabil dan mekanisme berkelanjutan, seperti diversifikasi ekonomi atau optimalisasi sumber daya lokal. Selain itu, distribusi manfaat yang adil menandakan bahwa hasil dari kegiatan pemberdayaan ekonomi ini tidak hanya difokuskan pada kelompok tertentu saja, melainkan dapat dinikmati oleh berbagai elemen masyarakat sehingga mampu mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Peningkatan infrastruktur dan pembangunan bangunan fisik juga menjadi indikator nyata dari investasi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan. Adanya infrastruktur yang lebih baik tidak hanya mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat serta mencerminkan perwujudan nyata dari transformasi sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara, sekretaris desa Bapak Rofi'i Menuturkan bahwa pihak Pemerintah Desa Tambak Kalisogo melakukan pemberdayaan ekonomi dengan memberikan dukungan terhadap sarana dan pembangunan infrastruktur. Pada beberapa tahun lalu, Pemerintah Desa Tambak Kalisogo memberikan bantuan berupa mesin pembuat pakan ikan kepada petani tambak sebagai sarana penunjang aktivitas budidaya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas budidaya tambak dengan memberikan solusi terhadap tantangan seperti biaya pakan yang tinggi, metode tradisional yang kurang efektif, serta ketergantungan pada pakan komersial. Mesin tersebut dalam kegunaannya ialah dapat dimanfaatkan oleh para petani tambak untuk menghaluskan pur. Bantuan tersebut diterima dengan baik oleh para petani tambak dan dipergunakan sebagaimana manfaat semestinya. Respons positif tersebut menunjukkan bahwa program ini relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dirancang dengan pendekatan berbasis masalah nyata. Selain memberikan manfaat langsung, seperti peningkatan hasil panen dan efisiensi kerja, bantuan ini juga mendorong kemandirian petani dalam mengelola sumber daya yang tersedia.

Bantuan yang kedua ialah dilakukan pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jembatan yang rusak. Jembatan ini memiliki peran strategis sebagai salah satu akses jalan utama

bagi para petani tambak untuk mengangkut dan menjual hasil panen mereka ke wilayah Bangil, Kabupaten Pasuruan. Kerusakan jembatan tersebut sebelumnya telah menghambat aktivitas ekonomi petani dan masyarakat setempat terutama dalam hal distribusi hasil budidaya yang merupakan alur penting dalam siklus perdagangan lokal. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Desa Tambak Kalisogo segera mengambil langkah untuk memperbaiki jembatan. Langkah yang diambil ialah dengan melakukan pengajuan ke Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo untuk segera memperbaiki jalan tersebut. Perbaikan ini bertujuan tidak hanya untuk memulihkan fungsi infrastruktur yang rusak, tetapi juga untuk memastikan kelancaran alur distribusi hasil panen dan memperkuat konektivitas wilayah. Dengan akses yang lebih baik, petani tambak dapat menghemat waktu dan biaya dalam pengangkutan, sehingga mendukung efisiensi serta meningkatkan daya saing produk perikanan mereka di pasar.

Saat ini, Pemerintah Desa melakukan perencanaan untuk membuat akses jalan yang menghubungkan Desa Tambak Kalisogo dengan Desa Kedungpandan. Akses tersebut bertujuan untuk lebih memperlancar sekaligus mempermudah akses perekonomian warga terutama petani tambak. Pihak Pemerintah Desa menjelaskan bahwa jalan yang saat ini menjadi akses utama para petani tambak hanya bisa dilalui oleh sepeda motor dikarenakan lebar jalan yang kurang memadai. Apabila dapat dibangun jalan yang dapat dilalui oleh mobil atau pick-up, maka akses perekonomian akan menjadi lebih baik. Oleh karenanya, pihak Pemerintah Desa Tambak Kalisogo ingin membangun akses jalan lebih lebar melalui kerjasama dengan Pemerintah Desa Kedungpandan. Langkah tersebut dianggap sesuai dengan visi misi pemerintah daerah dalam rangka percepatan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, rancangan program terhalang masalah kepemilikan lahan yang merupakan milik pribadi warga. Persoalan kepemilikan lahan menjadikan pihak Pemerintah Desa tidak dapat melakukan pembangunan dan hingga saat ini langkah tersebut masih sebatas rancangan pembangunan pemerintah desa yang membutuhkan diskusi bersama secara lebih mendalam.

Berdasarkan kajian atas teori dan bentuk nyata di lapangan, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Desa Tambak Kalisogo terhadap kelompok petani tambak hanya memenuhi dalam hal peningkatan kualitas infrastruktur. Sedangkan komunitas melakukan pemberdayaan secara mandiri terhadap perekonomiannya dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yakni budidaya perikanan tambak meskipun terdapat keterbatasan kompetensi. Dua langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo yang meliputi pemberian fasilitas mesin pembuat pakan ikan dan juga perbaikan infrastruktur jembatan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah melaksanakan berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani tambak. Inisiatif pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan berdasar pada kebutuhan nyata masyarakat dan mengutamakan solusi yang berkelanjutan. Pemberian mesin pembuat pakan ikan dan perbaikan infrastruktur adalah dua langkah konkret yang memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan produktivitas petani tambak. Meskipun ada tantangan terkait dengan perencanaan pembangunan akses jalan baru, langkah-langkah yang telah diambil mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Akan tetapi, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo masih diperlukan optimalisasi untuk memaksimalkan tujuan kesejahteraan masyarakat.

B. Pemberdayaan Psikologis

Pemberdayaan psikologis adalah proses meningkatkan harga diri, kepercayaan diri, dan martabat individu melalui partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat (Scheyvens dan van der Watt, 2021) . Adanya pemberdayaan psikologis tersebut menjadikan masyarakat dapat merasa lebih berdaya, memiliki kendali atas hidup, dan mampu berkontribusi untuk komunitas secara positif. (Gohori dan van der Merwe, 2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemimpin adat daerah setempat melakukan pemberdayaan psikologis kepada masyarakat dengan menciptakan kesadaran akan budaya, harga diri, kebanggaan, dan peningkatan status karena pemberian lapangan pekerjaan. Kekuatan psikologis dalam masyarakat tercermin melalui optimisme terhadap masa depan, keyakinan pada kemampuan warganya, kemandirian, dan kebanggaan terhadap tradisi serta budaya.

Pada lokasi penelitian yakni Desa Tambak Kalisogo, pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap kelompok petani tambak masih kurang atau bahkan tidak dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa Tambak Kalisogo Bapak Muchmad Rofi'i ketika dilakukan wawancara oleh peneliti di Kantor Desa Tambak Kalisogo pada 27 Desember 2024 silam. Beliau menyampaikan bahwa para petani tambak kurang mendapatkan dukungan psikologis atau bahkan tidak sama sekali. Selama ini, ketika kelompok petani tambak mengalami suatu kendala ataupun permaslaahan terkait pekerjaannya yakni budidaya perikanaan, mereka langsung berkonsultasi dengan Dinas Perikanan melalui penyuluh perikanan yang ada di desa. Namun, jika para petani memerlukan bantuan administratif atau fasilitas lain dari Pemerintah Desa seperti dalam hal pengurusan persuratan atau penghubungan dengan Dinas Perikanan, pihak Pemerintah Desa selalu siap membantu.

Pernyataan ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap aspek psikologis petani yang mana seharusnya juga menjadi perhatian pihak pemerintah desa agar kelompok petani tambak merasa lebih diberdayakan dan tidak hanya bergantung pada dukungan teknis atau administratif. Keberadaan dukungan psikologis seperti pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan manajerial atau peningkatan kepercayaan diri penting untuk dilakukan dalam rangka mengurangi stres serta meningkatkan kekuatan psikologis petani dalam menghadapi tantangan dalam budidaya. Sementara itu, bantuan administratif yang diberikan oleh Pemerintah Desa menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi akses dan menjembatani komunikasi antara petani dan lembaga terkait terutama Dinas Perikanan.

Pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo terhadap kelompok petani tambak bertentangan dengan kajian empiris daripada pemberdayaan itu sendiri. Berdasarkan definisi teori, pemberdayaan psikologis memberikan landasan penting untuk dapat memahami kebutuhan masyarakat agar merasa lebih berdaya dan percaya diri. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Tambak Kalisogo masih memiliki kekurangan dalam penerapan konsep ini terhadap kelompok petani tambak. Dukungan pemerintah yang lebih holistik, termasuk pada aspek psikologis sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta membangun optimisme dan kebanggaan mereka terhadap profesi dan komunitasnya. Artinya, aspek pemberdayaan psikologis pada kerangka pemberdayaan Scheyvens (1999) ini masih belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo.

C. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial merujuk pada proses di mana rasa kebersamaan dan integritas suatu komunitas diperkuat melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan bersama (Scheyvens dan van der Watt, 2021). Kegiatan pemberdayaan ini dapat dilakukan berupa proyek sosial, kegiatan ekonomi,

atau aktivitas berbasis komunitas lainnya yang melibatkan partisipasi dan kolaborasi anggota masyarakat terutama dalam konteks ini ialah kelompok petani tambak. Melalui pemberdayaan sosial, anggota kelompok dapat merasa lebih terhubung satu sama lain, memiliki tujuan bersama, dan saling mendukung dalam mencapai kesejahteraan bersama. Kehadiran kelompok masyarakat yang kuat dapat dianggap sebagai indikasi penting dari tercapainya pemberdayaan sosial, dimana ditunjukkan dengan adanya penguatan hubungan sosial, solidaritas, dan partisipasi aktif antarindividu dalam komunitas tersebut (Gohori dan van der Merwe, 2022). Pemberdayaan sosial tidak hanya memperkuat hubungan antarindividu, tetapi juga meningkatkan kapasitas komunitas untuk mengatasi tantangan bersama, mengurangi ketimpangan, dan mendorong keberlanjutan sosial. Dengan demikian, pemberdayaan sosial berfungsi untuk memperkokoh struktur sosial dan menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara anggota komunitas.

Pemberdayaan sosial dapat dilakukan dengan adanya dukungan dari lembaga yang lebih kuat. Salah satunya adalah pemerintah desa. Namun, di Desa Tambak Kalisogo, pemerintah desa diketahui belum memberikan intervensi yang signifikan dalam kegiatan kelompok petani tambak. Hal ini diakui baik oleh sekretaris desa maupun ketua kelompok petani tambak yakni Bapak Syaifuddin bahwa pihak pemerintah desa bahwa tidak pernah terlibat secara langsung dalam kegiatan atau forum diskusi yang dilakukan oleh kelompok petani tambak. Diskusi atau forum biasanya diadakan melalui rapat internal yang dilakukan dalam kelompok petani tambak itu sendiri dengan didampingi oleh petugas penyuluh perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, Pemerintah Desa menunjukkan sikap yang kurang peduli terhadap dinamika kelompok tersebut. Dalam rapat tersebut, para anggota kelompok saling berbagi informasi membahas permasalahan yang dihadapi, serta merencanakan solusi bersama. Hasil dari diskusi yang mencakup ringkasan poin-poin penting dan kesepakatan yang dicapai kemudian disampaikan oleh ketua kelompok petani tambak yakni Bapak Syaifuddin kepada pemerintah desa (Pemdes). Apabila dalam diskusi muncul masalah yang memerlukan intervensi atau bantuan dari pemerintah desa ataupun pihak lainnya seperti Dinas Perikanan, maka ketua kelompok akan menyampaikan hal tersebut kepada Pemdes untuk difasilitasi lebih lanjut.

Pemberdayaan sosial merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam suatu komunitas melalui dukungan, kolaborasi, dan keterlibatan aktif berbagai pihak. Di Desa Tambak Kalisogo, pemberdayaan sosial terhadap kelompok petani tambak menunjukkan pola interaksi yang lebih berbasis internal. Kelompok petani tambak secara mandiri berdiskusi terkait budidaya tambak hanya melalui rapat internal yang ada di dalam kelompok. Meskipun pada beberapa waktu kegiatan diskusi tersebut juga didampingi oleh petugas penyuluh perikanan, namun proses ini mencerminkan adanya inisiatif kelompok dalam mengelola masalah mereka secara mandiri yang juga termasuk salah satu ciri pemberdayaan sosial. Sedangkan pihak pemdes lebih berperan sebagai fasilitator dengan merespons permintaan bantuan atau intervensi setelah ketua kelompok menyampaikan hasil diskusi. Dalam hal ini, ketua kelompok bertindak sebagai jembatan komunikasi antara petani tambak dan pihak pemdes. Selanjutnya ketika forum diskusi menghasilkan permasalahan yang membutuhkan bantuan dari pihak luar, maka Pemdes bertindak sebagai penghubung yang memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut. Peran ini juga termasuk suatu tindakan penting untuk memastikan bahwa kelompok petani tambak dapat memperoleh akses terhadap sumber daya dan bantuan yang diperlukan, sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan kelompok.

Tidak adanya keterlibatan secara aktif dari pemerintah desa terhadap kelompok petani tambak menjadi suatu temuan yang menunjukkan bahwa pada aspek ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan kajian empiris atas kerangka pemberdayaan masyarakat

khusus nya dalam hal pemberdayaan sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan pemahaman bahwa pemerintah desa tambak kalisogo belum memberikan pemberdayaan secara sosial kepada kelompok petani tambak. Padahal, keterlibatan yang lebih aktif dari pemerintah desa hendaknya dilakukan untuk dapat memberikan manfaat tambahan. Dengan adanya keterlibatan secara langsung, pemdes dapat memberikan panduan, sumber daya, dan dukungan lebih strategis dalam diskusi kelompok yang pada akhirnya dapat mempercepat penyelesaian masalah serta mendukung pemberdayaan sosial secara penuh. Selain itu, pihak pemerintah desa seharusnya juga dapat memberikan bentuk pemberdayaan sosial dengan mempererat hubungan antara kelompok petani tambak dengan komunitas atau kelompok lainnya yang ada di desa. Kurangnya kepedulian pihak pemerintah desa terhadap hubungan sosial baik di internal ataupun dengan eksternal kelompok petani tambak menjadi suatu hal yang seharusnya dapat lebih diperbaiki kembali. Meskipun kelompok petani tambak telah memperoleh dukungan dari instansi lain seperti Dinas Perikanan, namun hal tersebut tidak seharusnya menghilangkan peran dari pemerintah desa untuk memberikan perhatiannya. Hal ini penting untuk menciptakan sinergi yang lebih baik antara kemandirian komunitas dan dukungan kelembagaan.



Gambar 5. Kegiatan Forum Diskusi Internal Kelompok Petani Tambak
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

D. Pemberdayaan Politik

Pemberdayaan politik dapat diidentifikasi melalui perubahan dalam distribusi kekuasaan yang mengarah pada pergeseran antara kelompok dengan kekuatan dominan dan kelompok kurang berdaya (Cole, dalam Gohori dan van der Merwe, 2022). Pemberdayaan politik tercapai ketika seluruh lapisan masyarakat lokal mendapatkan representasi yang setara dan memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepentingan serta kekhawatiran mereka secara adil (Scheyvens, dalam Gohori & van der Merwe, 2022). Melalui pemberdayaan politik, kelompok yang dianggap kurang memiliki suara dalam proses politik diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, pemberdayaan politik juga melibatkan pemberian ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, dan kebutuhan mereka dengan cara yang dapat memengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif individu atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan dengan kesadaran dan kemauan penuh (Nababan dan Karniawati, 2022).

Pemberdayaan politik di tingkat desa dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan salah satunya dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Pada kegiatan Musrenbang di Desa Tambak Kalisogo, kelompok atau komunitas yang ada di desa tersebut selalu dilibatkan secara aktif termasuk juga Kelompok Petani Tambak. Bapak Rofi'i selaku Sekretaris Desa menuturkan bahwasanya kelompok Petani Tambak selalu dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang Desa

dengan diwakili oleh ketuanya yakni Bapak Syaifuddin yang mana saat itu sekaligus menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tidak hanya diberi kesempatan untuk hadir hanya sebagai pendengar, namun mereka juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Hal tersebut dibuktikan pada saat Musrenbang terakhir di 2024, ketua kelompok petani tambak tersebut menyampaikan pendapat atau usulannya terkait program desa di tahun berikutnya. Pada perancangan program ketahanan pangan desa, kelompok petani tambak yang diwakili oleh ketuanya mengajukan usulan untuk alangkah baiknya dilakukan budidaya pembesaran mujair nila sebagai salah satu program di tahun berikutnya. Kegiatan budidaya tersebut tidak dilakukan di area tambak, tetapi dilakukan di Sungai desa namun dalam pengurusannya tetap oleh pandega atau petani tambak.

Keterlibatan dalam penyampaian aspirasi sekaligus pengambilan keputusan atas rancangan program tersebut menunjukkan bahwa kelompok petani tambak tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang berperan aktif dalam perencanaan program. Meskipun hanya diwakili oleh ketua kelompok petani tambak, partisipasi aktif yang ditunjukkan dalam Musrenbang memiliki manfaat terhadap peningkatkan kapasitas politik kelompok melalui pengalaman langsung dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa program-program yang dirancang oleh pemerintah desa nantinya relevan dengan kebutuhan masyarakat. Langkah Pemerintah Desa Tambak Kalisogo dalam melibatkan komunitas lokal khususnya kelompok petani tambak menjadi model pemberdayaan politik berbasis inklusi. Melalui pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan, maka pemerintah desa tidak hanya dianggap mendorong partisipasi aktif tetapi juga membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program yang dihasilkan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi diharapkan dapat menjadi salah satu landasan bahwa hasil pembangunan yang dilaksanakan selaras dengan kebutuhan yang mereka miliki (Darin, et al, 2022). Usulan seperti yang dilakukan oleh kelompok petani tambak terkait budidaya mujair nila untuk salah satu program ketahanan pangan menunjukkan bahwa pemberdayaan politik dapat menghasilkan solusi yang berbasis pada potensi lokal dan kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan komunitas lokal mampu menciptakan program pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi perekonomian desa.

Pemberdayaan politik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo terhadap kelompok petani tambak telah berjalan sesuai dengan kajian empiris dari indikator teori. Keterlibatan kelompok petani tambak dalam menyuarakan usulannya ketika kegiatan Musrenbang Desa menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa memberikan kesempatan terhadap lapisan di bawahnya untuk turut mendapakan kesempatan yang setara dalam hal pembutaan kebijakan. Dengan memberikan kesempatan yang setara kepada kelompok petani tambak untuk menyampaikan aspirasi mereka, artinya pemerintah desa tidak hanya memperkuat pondasi kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan desa. Proses ini juga dapat berpotensi menciptakan ruang untuk pemberdayaan politik yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif dari kelompok petani tambak dalam memengaruhi arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

KESIMPULAN

Potensi budidaya tambak menjadi salah satu sektor ekonomi utama di Desa Tambak Kalisogo khususnya bagi warganya yang bermatapencaharian sebagai petani tambak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka pemberdayaan masyarakat oleh Scheyvens (1999)

yang terdiri atas pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan psikologis, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan politik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara terhadap pemerintah desa dan kelompok petani tambak, diperoleh temuan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap Kelompok Petani Tambak di Desa Tambak Kalisogo menunjukkan beberapa indikator telah dilaksanakan dengan baik, namun beberapa indikator lainnya masih memerlukan peningkatan pelaksanaan terutama dalam hal pemberdayaan psikologis dan pemberdayaan sosial.

Pada indikator pemberdayaan ekonomi, pemerintah desa memberikan wujud pemberdayaan melalui pemberian bantuan sarana berupa mesin pembuat pakan ikan serta perbaikan infrastruktur jembatan yang dilalui para petani tambak ketika mendistribusikan hasil panennya. Kedua, pada indikator pemberdayaan psikologis, pemerintah desa kurang menunjukkan bentuk pemberdayaan yang diberikan. Sama halnya dengan indikator ketiga yakni pemberdayaan sosial, dimana pemerintah desa tidak menunjukkan peran secara aktif untuk bergabung dalam aktivitas sosial kelompok petani tambak seperti forum diskusi melainkan hanya menerima penyampaian hasil diskusi saja ketika dianggap ada sesuatu hal yang perlu diberikan bantuan. Indikator terakhir yakni pemberdayaan politik dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo dengan melibatkan kelompok petani tambak untuk turut menyampaikan aspirasinya pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Tidak adanya pemberdayaan yang diberikan dalam indikator pemberdayaan psikologis dan sosial tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Sedangkan pada indikator teori pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan politik meskipun telah dilakukan dengan baik, namun masih harus dioptimalkan untuk memaksimalkan hasil yang ingin dicapai yakni kesejahteraan pembangunan masyarakat.

Pada sisi akademis, fokus indikator kerangka pemberdayaan oleh Scheyvens belum terlaksana secara maksimal oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan analisis menggunakan teori penelitian yang lain untuk dapat mengetahui lebih dalam terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo terhadap Kelompok Petani Tambak. Pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup pemberdayaan mental dan sosial yang membangun kapasitas kelompok dengan lebih baik. Peneliti menyarankan agar pemerintah desa dapat melakukan pemberdayaan terhadap kelompok petani tambak dengan mengadakan forum atau kegiatan yang diikuti oleh seluruh kelompok petani tambak dan juga Pemerintah Desa Tambak Kalisogo sebagai wujud pemberdayaan sosial, psikologis, dan mengoptimalkan pemberdayaan politik. Tidak hanya itu, pemberian pelatihan dan pendampingan terkait pengolahan hasil budidaya yang masih mentah menjadi makanan siap saji, pemberian pelatihan budidaya secara lebih modern dengan pemanfaatan teknologi, serta sosialisasi terkait penggunaan obat untuk mengatasi penyakit di bidang perikanan dapat dilakukan sebagai sarana pengoptimalan pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan para petani tambak.

ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yakni Pemerintah Desa Tambak Kalisogo yang diwakili oleh Bapak M. Rofi'I dan perwakilan Kelompok Petani Tambak Desa Tambak Kalisogo Bapak

Syaifuddin atas kesempatannya untuk berbagi ilmu, wawasan, serta data yang sangat berharga bagi penelitian ini. Kontribusi dan informasi yang diberikan menjadi fondasi penting dalam penyusunan artikel ini. Akhir kata, semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki kekurangan, sehingga masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

Arianto, M. F. (2020). Potensi Wilayah Pesisir di Negara Indonesia. *Jurnal Geografi*, *10*(1), 204-215.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). *Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya di Provinsi Jawa Timur*. Jatim BPS. https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/U20wMk16RmhlR1JLWkdrMWRYQkxUVzB2YXpSelp6MDkjMw==/produksi-dan-nilai-produksi-perikanan-budidaya-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-budidaya-di-provinsi-jawa-timur.html?year=2022

Coy, D., Malekpour, S., Saeri, A. K., & Dargaville, R. (2021). Rethinking Community Empowerment in The Energy Transformation: a Critical Review of The Definitions, Drivers and Outcomes. *Energy Research & Social Science*, *72*, 101871.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. (2022). *Statistik Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022*.

Fatonah, R., Irma, I., Maulana, M. Z., & Yasin, M. (2024). Hubungan Masyarakat dan Budaya Lokal dalam Interaksi Sosial Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)*, *2*(01), 41-50.

Gohori, O., & van der Merwe, P. (2022). Tourism and Community Empowerment: The Perspectives of Local People in Manicaland Province, Zimbabwe. *Tourism Planning and Development*, *19*(2), 81–99. https://doi.org/10.1080/21568316.2021.1873838

Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy, 1 (2), 106-134*. https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778

Hakim, M. A., & Eriyanti, F. (2019). Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Kelompok Budidaya Ikan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *1*(3), 367-375.

Harini, N., Suhariyanto, D., Indriyani, I., Novaria, N., Santoso, A., & Yuniarti, E. (2023). Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Perekonomian Desa. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, *4*(2), 363–375. https://doi.org/10.37680/amalee.v4i2.2834

Humaira, D. R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, *7*(2), 99-108. https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i2.2840

Ibrahim, I., St Aisyah, B. M., & Hamriani, H. (2020). Pemberdayaan Pekerja Tambak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Baru-Baru Tanga Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi*, *1*(2).

Irianto, B. S. (2021). Kebijakan Poros Maritim Dan Strategi Ekonom Serta Keamanan Laut. *Jurnal Justiciabelen*, *4*(1), 1-10. http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i1.2771

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). *Volume Produksi Perikanan*

Indonesia (Ton). Portal Data KKP. https://portaldata.kkp.go.id/portals/data-statistik/prod-ikan/tbl-statis/d/44

Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, *6*(1), 33-39. https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075

Mardikanto, T. & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Merinda, R. O. (2022). *Pemberdayaan Petani Tambak Udang Oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., & Widiyawati, R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat. *Global Eksekutif Teknologi*.

Nababan, J., & Karniawati, N. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Desa Si Pultak Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi.* Vol. 12.

Nurhasanah Purba, N., & Ivanna, J. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Umum, Pembangunan Pemberdayaan, dan Perlindungan di Desa Kuta Pinang. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1). https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6291

Pathony, T. (2019). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang. *International Journal of Demos, 1(2), 262-289.*. http://hk-publishing.id/ijd-demos

Portal Informasi Indonesia. (26 Juli 2023). *Menyiapkan Tata Kelola Laut Berkelanjutan*. Indonesia.go.id. https://indonesia.go.id/kategori/ragam-ais-forum-2023/7295/menyiapkan-tata-kelola-laut-berkelanjutan

Putra, T. S., & Rahaju, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Perikanan Budidaya di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 1643-1654.

Sari, A. P., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *17*(5), 3067. https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2619

Sarosa, S. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT. Kanisius.

Satu Data Kabupaten Sidoarjo. (2023). *Jumlah Petani Tambak dan Pandega (PTP) Menurut Kecamatan dan Desa di Kabupaten Sidoarjo*. Open Data Sidoarjo. http://opendata.sidoarjokab.go.id/id/dataset/jumlah-petani-tambak-dan-pandega-ptp-menurut-kecamatan-dan-desa-di-kabupaten-sidoarjo/resource/a5f8ad62-e6bb-400c-8ab0-d7a30bae695d

Saufiah, R., Arpandi, A., & Hasbiyah, S. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tabalong Mati Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, *1*(3), 634-644.

Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism management*, *20*(2), 245-249. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7

Scheyvens, R., & van der Watt, H. (2021). Tourism, Empowerment and Sustainable Development: a New Framework for Analysis. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(22). https://doi.org/10.3390/su132212606

Septyanni, P. W., & Hasan, F. (2021). Kelayakan Finansial Budidaya Udang di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon). *AGRISCIENCE*, *1*(3).

http://journal.trunojoyo.ac.id/agriscience

Soecahyo, D., Irwantono, I., & Romadona, Y. S. (2023). Pengembangan Pemanfaatan Potensi Perikanan Jawa Timur Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat. *Parjhuga: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Daerah*, *1*(1), 19-28.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (13th ed.). Bandung: Alfabeta.

Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365-380. https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wibisono, G., Nukha, R., & Bina Margiana, D. (2023). *Sustainable Livelihood Framework* Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tambak Kalisogo, Kabupaten Sidoarjo. *Islamic Management and Empowerment Journal*, *5*(1), 73–86. https://doi.org/10.18326/imej.v5i1.73-86